

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dari tahun 2012 sampai 2014, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, masalah penting pada bidang kesehatan yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Demak sampai saat ini diantaranya adalah mengenai pemberantasan penyakit musiman seperti penyakit Demam Berdarah (DB), masih tingginya tingkat Angka Kematian pada Ibu melahirkan (AKI) yang baru mencapai 81,68 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang baru mencapai 6,4 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Selain itu, masalah yang paling utama terjadi di Kabupaten Demak adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif dan melakukan hal preventif dalam menghadapi masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan terdekat, yang dalam hal ini juga menyebabkan kurang maksimalnya peran aparaturnya untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat kepada masyarakat untuk meningkatkan angka kesehatan di Kabupaten Demak.

Kedua, secara umum realisasi APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012 sampai 2014 cukup baik, namun masih dijumpai beberapa alokasi anggaran yang realisasinya masih jauh dari target anggaran yang ada seperti yang terjadi pada tahun 2014 yang realisasinya hanya mencapai 79,60 %

dari total anggaran yang penyebabnya diketahui karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan penambahan program pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung sehingga membutuhkan peyesuaian dengan aturan yang baru, selain itu juga disebabkan karena adanya kebijakan untuk melakukan pembelanjaan keperluan program melalui sistem e-Katalog yang proses pemesanannya melalui sistem online dan belum dapat diproses secara langsung mengingat ketersediaan ada atau tidaknya barang yang dipesan.

Ketiga, alokasi anggaran untuk belanja langsung dan tidak langsung yang masih mengalami ketimpangan, yaitu lebih besar alokasi untuk anggaran tidak langsung dibandingkan belanja langsung pada setiap tahunnya kecuali yang terjadi pada tahun 2014 dan ini menunjukkan bahwa belanja dinas kesehatan masih banyak terserap untuk pembiayaan belanja tidak langsung khususnya untuk gaji pegawai dibandingkan belanja program ke masyarakat. Ini menunjukkan gemuknya jumlah PNS di Dinas Kesehatan sehingga kebijakan moratorium PNS adalah hal yang perlu dipertimbangkan demikian anggaran tambahan penghasilan PNS.

Keempat, alokasi belanja modal pada belanja langsung setiap tahun yang masih sedikit dibandingkan dengan alokasi belanja lainnya yang dalam hal ini diketahui penyebabnya adalah karena adanya kebijakan pemerintah pusat untuk lebih mengutamakan pembelanjaan untuk program pelayanan kesehatan secara langsung. Sehingga menyebabkan peningkatan belanja untuk keperluan sarana prasarana, tenaga medis, alat peraga, dan belanja kebutuhan lainnya untuk menunjang pelaksanaan belanja program.

Kelima, kecilnya alokasi anggaran beberapa program yang dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat miskin, yaitu program peningkatan pelayanan kesehatan balita dan lansia, program peningkatan gizi masyarakat, program obat dan perbekalan kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di tarik dari hasil analisis data, maka penulis mencoba memberikan rekomendasi sebagai berikut :

Pertama, perlunya sinergitas kerja sama antara aparatur dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Demak selain itu juga diperlukan peningkatan kesadaran untuk bertindak secara proaktif dan prefentif dari masyarakat yang dapat ditempuh melalui beberapa program promosi kesehatan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

Kedua, perlu peningkatan alokasi belanja langsung dinas kesehatan sehingga proporsional dengan jumlah belanja tidak langsung dalam rangka peningkatan program akses kesehatan masyarakat Kabupaten Demak.

Ketiga, perlu rasionalisasi PNS di sektor Dinas Kesehatan agar alokasi belanja tidak langsung proporsional dengan belanja langsung, seperti moratorium PNS serta meninjau anggaran tambahan penghasilan bagi PNS.

Keempat, perlu peningkatan alokasi anggaran untuk akses kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin, ibu melahirkan, balita, dan lansia.